

EFEKTIFITAS PERENCANAAN PENANGANAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH

Alfonsus Florantino¹, Imanuel Wellem², Viktor Eko Transilvanus³
Universitas Nusa Nipa^{1,2,3}
florantinoalfonsus@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan perumahan dan permukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Sikka membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan pedesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan, penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan di Kelurahan Madawat karena memiliki potensi untuk menjalankan usaha karena lokasi strategis dekat dengan perkantoran. Simpulan bahwa Kelurahan Madawat melakukan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, dan bekerjasama dengan pemerintah Daerah membuat dokumen kebijakan teknis terkait penanganan dan permukiman kumuh, dan program kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kata Kunci: Efektifitas, Perencanaan Penanganan, Permukiman Kumuh.

ABSTRACT

The study aims to analyze the effectiveness of management planning in efforts to accelerate the decommissioning of slum settlements in the Kelurahan Madawat district of Sikka. This type of research is qualitative descriptive. The results of the research showed that the existence of housing and settlement problems that occurred in the territory of Sikka district had an impact on the occurrence of the shift pattern in the use of space from rural to urban areas, housing handling and dusty settlements carried out in Kelurahan Madawat because of the potential to carry out business due to the strategic location close to the office. Conclusion that the Foundation is conducting the management of Kumuh Housing and Settlements, and in cooperation with the regional government to develop technical policy documents relating to the management and settlements of the Kumuh, and program of activities and sub-activities related to the handling of the kumuh for low-income communities (MBR).

Keywords: Efficiency, Handling Planning, Smog Settlements.

PENDAHULUAN

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas. Dalam rangka menunjang aspek pendidikan di perguruan tinggi yang profesional dan siap bersaing dalam dunia kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari beberapa bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, salah satunya ialah dengan melakukan Magang di Instansi Pemerintahan atau tempat kerja lainnya, kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual saat berada di lapangan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, profesional dan siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Mengingat juga sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di Indonesia, maka Universitas Nusa Nipa melalui kegiatan pelaksanaan Magang/Kerja Praktik (KP) Salah satunya yakni Prodi Manajemen sendiri mengambil keputusan untuk menerapkan program magang sebagai program MBKM agar mahasiswa dipersiapkan secara matang sebelum bersaing dalam dunia kerja nyata.

Magang merupakan bentuk perkuliahan yang berhadapan langsung dengan dunia kerja di lapangan. Magang kerja ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja, yang nantinya digunakan untuk pengembangan kapasitas. Kegiatan

magang kerja ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Sikka. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Prinsip otonomi daerah lahir karena tidak semua urusan yang ada di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu juga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di daerah, dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh masuk dalam bagian dari pembagian urusan pemerintahan konkuren. Di mana pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemukiman, sehingga terwujudnya pelayanan dasar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah pemerintah daerah Kabupaten Sikka. Di

mana pilihan wajib yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sikka adalah pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan perumahan dan permukiman yang terjadi terjadi di Kabupaten Sikka merupakan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sikka membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan pedesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan. Perkembangan kebutuhan ruang wilayah dan kondisi daya dukung ruang wilayah yang mengalami pergeseran mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kawasan terbangun. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Sikka perlu adanya arahan pengembangan kewilayahan sehingga pemanfaatan ruang wilayah oleh pengguna ruang yang secara fungsi mempunyai nilai ekonomis dapat terkendali. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu penetapan pemanfaatan ruang yang komprehensif sehingga pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi, dan harmonisasi dalam mewujudkan tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka.

Berdasarkan kebutuhan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sikka, maka dibutuhkan suatu pedoman agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisir dengan baik, serta permasalahan permukiman kumuh bisa terselesaikan tanpa merugikan pihak mana pun. Proses urbanisasi yang semakin tinggi meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan di daerah perkotaan yang

berakibat pada kebutuhan perumahan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak sehingga menimbulkan munculnya permukiman kumuh di berbagai Kawasan di daerah perkotaan (Yoshino, 2015).

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan kondisi fisik perumahan milik masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu timbul di wilayah perkotaan. Karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga mayoritas masyarakat beralih untuk menempati lahan-lahan kosong milik Negara ataupun swasta yang kemudian melahirkan bangunan-bangunan liar yang cenderung kumuh dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Di mana dalam masalah ini Pemerintahan Kabupaten Sikka telah melimpahkan kewenangan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) sebagai badan yang melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kab. Sikka untuk melaksanakan tugas dan fungsi disektor perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti mengambil objek pada Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Sikka, menggunakan kajian teori konsep efektifitas, pengertian tentang permukiman kumuh, dan efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

METODE PENELITIAN

Kegiatan magang dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Sikka, Jalan Mawar No. 24 Maumere. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya dalam Mengatasi Percepatan Pengentasan Permukiman Kumuh

Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta menjaga dan meningkatkan kualitas bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Urgensitas madawat dijadikan lokasi penanganan kumuh yaitu itu dilihat dari 2 aspek yaitu aspek masalah dan aspek potensi: (1). Aspek masalah yaitu: a). Merupakan daerah genangan. b). Saranan prasarana unitilitas umum seperti drainase dan jalan masih buruk sering terjadi genangan air. c). Sanitasi buruk (MCK buruk). d). Banyak sampah. e). Kepadatan bangunan yang cukup tinggi. f). Kebakaran. g). Masih banyak Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH). (2). Aspek potensi yaitu: a). Kelurahan Madawat merupakan beranda kota maumere. b). Lokasi strategis untuk menjalankan usaha. c). Kelurahan Madawat berdekatan dengan wilayah perkantoran

Identifikasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Madawat

Peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh ialah mengidentifikasi terlebih dahulu di RT/ RW di Kelurahan Madawat yang masuk dalam kategori kawasan kumuh karena hampir setiap RT/RW memiliki karakteristik masing-masing untuk di indetifikasi dan di Kelurahan Madawat sendiri terdapat 4 RT/ 3 RW yang masuk dalam kategori kawasan kumuh dan sudah ditetapkan oleh SK Bupati tentang penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, berikut RT/RW yang teridentifikasi kumuh di Kelurahan Madawat.

Tabel 5.1. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Madawat

No	Lokasi	Luas	Jiwa/Ha
1	RT001-RW006	1,81	216
2	RT001-RW007	0,87	119
3	RT003-RW008	0,76	187
4	RT004-RW008	1,29	178
Total		4,73	700

(Sumber Data: Bapelitbang)

Dengan sudah diidentifikasinya kawasan-kawasan yang terindikasi kumuh maka nantinya pemerintah akan lebih mudah dalam menanganinya.

Permasalahan dan Upaya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh, yaitu: (1). Partisipasi / swadaya masyarakat untuk kolaborasi pembiayaan masih rendah. (2). Masih lemahnya koordinasi terkait kolaborasi program dan pembiayaan dengan pihak swasta BUMN/BUMD. (3). Kondisi fisik daerah yang terbatas. (4). Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam penanganan kumuh karena kondisi yang ada masing-masing sektor bergerak sendiri-sendiri.

Dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh Pemerintah Daerah mengambil kebijakan, yaitu: (1). Pemerintah Daerah membuat dokumen kebijakan teknis terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh yakni dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2PKPK) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan (RP3KP). (2). Adanya regulasi terkait penanganan kumuh yakni perda nomor 6 tahun 2021 tentang penanganan kumuh dan peraturan bupati standart harga terkait pembiayaan fisik pekerjaan. (3). Adanya program kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka, Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanian. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat

Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Pertanian. (4). Pemerintah telah melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tingkat kabupaten yang terekam dalam aplikasi e-RTLH. (5). Adanya anggaran untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh. (6). Adanya kesewedayaan masyarakat terkait pembiayaan dimana tidak murni pembiayaannya dari pemerintah, ada kalaborasi dan swadaya/partisipasi masyarakat penerima bantuan.

SIMPULAN

Penanganan Perumahan dan Permukiman kumuh dilaksanakan di Kelurahan Madawat karena Kelurahan Madawat memiliki potensi untuk menjalankan usaha karena lokasi strategis dekat dengan perkantoran. Pemerintah Daerah membuat dokumen kebijakan teknis terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh yakni dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2PKPK) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan (RP3KP). Adanya program kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka, Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinluyi, M. L., & Adedokun, A. (2014). Urbanization, Environment and Homelessness in the Developing world: The Sustainable Housing Development. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(2), 261-261.
<http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n2p261>

- Budiharjo, E. (1991). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Indonesia, P.R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis Proses Pemberian Pinjaman dalam Mitigasi Risiko Kredit sebagai Solusi Kredit Macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579–3585. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26625>
- Ginandjar, K. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*. PT. Cidesindo. Jakarta
- Imanuel, I. ., & Djawoto, D. (2022). The Effect of Compensation on Employee Performance Through Job Satisfaction as Intervening Variable . *International Conference of Business and Social Sciences*, 2(1), 1400–1411. Retrieved from <https://debian.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/323>
- Juru, P., & Wellem, I. W. (2022). The Effect of Workload on Employee Performance With Job Stress as Intervening Variable in The Land Agency Office of Sikka Regency. *International Conference of Business and Social Sciences*, 2(1), 623–633. Retrieved from <https://ojsicobuss.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/216>
- Klaudia, F., Andreas, R., & Viktor, E. T. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 1(4). Retrieved from <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/185>
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kurniasih, S. (2007). *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara–Jakarta Utara*. Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur. Jakarta Selatan
- Maria, E. B. K., Antonius, P. K., & Viktor, E. T. (2023). Pengaruh Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 1(4). Retrieved from <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/184>
- Miftah, T. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhtar, M. (2012). *Rapid Assessment Daerah Aliran Sungai Ciliwung di Kelurahan Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu, DKI Jakarta*. P3KS Press (Anggota IKAPI). Jakarta
- Muta'ali, L., & Arif, R. N. (2019). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa Ke Masa*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal*

- Ekonomi dan Bisnis Islam*), 3(2), 185-194.
<http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Oktaviansyah, E. (2012). Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 14(2), 141-150.
<https://doi.org/10.15294/jtsp.v14i2.7093>
- Rangga, Y. D. P. (2022). *Manajemen Pemasaran (Teori dan Implementasi dalam Perguruan Tinggi)*. Eureka Media Aksara. Purbalingga
- Rangga, Y., Gheta, A., & Wellem, I. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Aspek Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka). *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 190-201. Retrieved from <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/661>
- Rindarjono, Mohammad Gamal. (2013). *Slum Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Media Perkasa. Yogyakarta
- Sadyohutomo., M. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sedarmayanti, S. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti, S. (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Tonce, Y., dan Yoseph D. R. (2020) *Minat dan Keputusan Pembelian: Tinjauan Melalui Persepsi Harga & Kualitas Produk (Konsep dan Studi Kasus)*. CV. Adanu Abimata, Jawa Barat
- Transilvanus, V. E., Tonce, Y., Juru, P., Dince, M. N., & Sea, M. N. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 35–42.
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1207>
- Wellem, I. (2023). Pengaruh Quality Of Work Life terhadap Kinerja Pegawai dengan Job Burnout Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 190-198.
<https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.403>
- Yoshino, N., Helble, M., Aizawa, T. (2015). *Housing Policies for Asia: A Theoretical nalysis by Use of a Demand and Supply Mode*. Asian Development Bank Institute. Japan